IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOMPETENSI GURU DI SD MUHAMMADIYAH 2 PALU

Bahral Djirimu
Bahral27@gmail.com
Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The aim of this research was to determine and explain the reasons of non-fulfillment of teachers' competency in SD Muhammadiyah 2 Palu, Palu Timur, and to determine the factors that influence the policies which were assessed based on the model of public policy implementation Edward III by using the variable I) Communication 2) Resources 3) Disposition or attitude of executors 4) The bureaucratic structure. This is a qualitative research. The informants were taken by using purposive sampling technique and selected five informants.The results showed that the implementation of the policy of teachers' competence in SD Muhammadiyah 2 Palu is not optimal, especially personality and profession competence, as 1) The communication between the implementer, in this case the principal, and the teachers is not intensive yet, 2) human and fund resource are inadequate. So that, the implementation of teachers' competence in SD Muhammadiyah 2 Palu is not optimal due to the policy implementor did not have intensive communication and the lack of fund causes the policy implementor cannot work optimally.

Keywords: *Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure.*

Implementasi Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma IV (D-I V)atau Sarjana (S-I) dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD/PGMI). Standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi padagogik, kepribadian, sosial dan professional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru antara lain,faktor yang berasal dari dalam diri individu, meliputi; latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, etos kerja, penataran, dan pelatihan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kompetensi guru, misalnya iklim kerja, kebijakan organisasi, lingkungan sosial kerja, sarana dan prasarana. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi kompetensi guru dalam mengajar. Oleh karena itu hubungannya dengan implementasi kebijakan kompetensi guru maka perlu dikaji faktor-faktor yang kemungkinan besar pengaruhnya, yaitu latar belakang pendidikan guru, pengalaman mengajar guru, dan etos kerja guru.

Pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan SDM yang berkualitas dan SDM yang berkualitas merupakan penentu tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa. Tujuan pendidikan salah satunya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar cakap dan terampil dalam suatu bidang pekerjaan. Pengembangan peserta didik ini tidak lepas dari peran pendidik, dalam hal ini adalah guru.

Guru SD.Muhammadiyah 2 Palu berjumlah 12 orang , yang terdiri dari 8 orang guru PNS yang sudah menjadi peserta sertifikasi, dan 4 orang guru honorer, tingkat pendidikan mereka adalah 10 orang sarjana (S1), 1 orang D.II (Honorer) dan 1 orang SPG (PNS), kalau dilihat dari segi

pendidikan, guru SD.Muhammadiyah 2 Palu sudah memenuhi salah satu syarat untuk menjadi guru professional,mengingat profesi guru memegang peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, maka seorang guru dituntut untuk memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai standard yang telah ditetapkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 , orang yang memiliki kompetensi yang memadai tentunya akan berpengaruh positif terhadap potensi peserta didik. Kompetensi seorang guru tidak lepas dari latar belakang pendidikanya.

Pengalaman mengajar dalam semua kegiatan sangat diperlukan, karena Experience is the best teacher, Pengalaman merupakan guru yang terbaik.Pengalaman adalah guru bisa yang tidak pernah marah. Pengalaman adalah guru tanpa jiwa, namun selalu dicari oleh siapapun juga. Guru sebagai pelaksana proses belajar mengajar tentu pernah mengalami suatu masalah dalam mengajar. Selama mengajar guru akan menemukan hal-hal baru, dan jika hal tersebut dipahami dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya akan memberi pelajaran yang berarti bagi guru itu sendiri.

Seperti diketahui bahwa guru SD berbeda dengan guru SLTP dan SLTA, kalau guru SD.mau tidak mau harus menjadi guru kelas dalam arti, memegang semua mata pelajaran seperti: PKn, Bahasa Indonesia, IPA, Matematika, IPS, dan SBK, sedangkan guru SLTP dan SLTA hanya menjadi guru bidang studi. Pengalaman-pengalaman yang dialami oleh setiap guru di SD Muhammadiyah 2 Palu masing-masing berbeda, dalam perbedaan itulah guru-guru saling memberi masukan satu sama lain bila ada rapat interen dewan guru dalam setiap ada kesempatan, namun dalam perjalanannya tetap ada kendala yang dihadapi guru-guru SD.Muhammadiyah 2 Palu untuk menjadi guru yang professional, penyebabnya antara lain karena dituntut harus menguasai 6 mata pelajaran tesebut diatas, sementara kemampuan guru berbeda-beda, ditambah lagi penggunaan media pembelajaran/alat peraga belum lengkap pada setiap pokok bahasan, tetapi walaupun ada alat peraga kadang-kadang guru belum menguasai penerapan media pembelajaran dalam materi yang terdapat pada pokok bahasan, Jadi kaitannya dengan kompetensi, maka pengalaman mengajar yang begitu lama tidak menjamin seorang guru menjadi professional dan berkualitas apa lagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju, dan mau tidak mau guru harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi supaya tidak ketinggalan.

Ketulusan dalam bekerja dan mencintai profesinya merupakan pintu masuk bagi guru untuk menjadi guru yang profesional dan berkualitas. Jika guru mencintai profesinya dan mencintai anak didiknya, maka hambatan dan kesulitan tidak akan mematahkan semangat guru untuk terus berkarya. Untuk mencintai profesinya, guru harus menengok kembali ke belakang mengapa menjadi guru. Memurnikan kembali motivasi awal menjadi guru, menghapus keterpaksa an dan menukarnya dengan kejernihan visi dan misi baru yang tercermin dalam etos kerja yang tinggi.Menurut Soejitno Irmim dan Abdul Rochim (2006: 33), mengatakan bahwa:Etos kerja guru dapat ditampilkan melalui: 1). Selalu mempersiapkan materi pembelajaran. 2). Selalu tepat waktu. 3). Bekerja dengan target rasional. 4). Mengisi jam kerja dengan efektif. 5). Tanggung jawab terhadap program. 6). Kreatif dan inovatif. 7). Tidak mudah putus asa. 8). Konsisten dan konsekuen. 9). Senang membaca dan belajar. 10). Senang menulis.

Dari 10 tampilan yang berhubungan dengan etos kerja tersebut di atas, guru SD.Muhammadiyah 2 Palu secara umum sudah dapat dikatakan baik, karena salah satunya hal ini terlihat dari kelulusan siswa setiap tahunnya lulus 100 %, tetapi secara khusus belum baik karena salah satu penyebabnya adalah nilai mata pelajaran Ujian Nasional (UN) belum memuaskan,

karena nilai siswa yang lulus setiap tahunnya masih rata-rata standard kebawah.

Kondisi seperti tersebut di atas mendorong Pemerintah daerah untuk mensosialisasikan kebijakan Implementasi Kompetensi Guru melalui Dinas Pendidikan Kota Palu, sebagaimana telah diatur dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Implemmentasi kebijakan kompetensi guru bersifat *top down* dan harus dilaksanakan jajaran vertical dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Palu dan Sampai UPTD.Kecamatan Palu Timur sebagai pelaksana kebijakan yang ada di bawahnya, oleh sebab itu perlu didukung dengan komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.Komunikasi antara pembuat kebijakan (pelaksana) dan *Target Group* (kolompok sasaran) harus dilakukan dengan efektif, yaitu penyampaian isi kebijakan kepada para pelaksana (Transmitted) dengan jelas dan konsisten agar mereka tahu apa yang dilakukannya. Selanjutnya sumberdaya sebagai faktor penting dalam implementasi kebijakan meliputi sumberdaya staf, kewenangan dan fasilitas kerja sebagai pendukung keberhasilan suatu kebijakan. Berikutnya kemauan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dan bertanggung jawab, kemudian struktur birokrasi yang mengutamakan prosedur Standar Operasional Procedure (SOP) dan didukung oleh kordinasi yang efektif dari instansi yang terlibat.

Dari uraian tersebut di atas, yang dijadikan penulis dalam fokus penelitian adalah teori George Edwar III yaitu; komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian sementara bahwa fenomena yang terjadi adalah kompetensi guru pada SD.Muhammadiyah 2 Palu belum sesuai antara harapkan dan kenyatan, karena itu penulis tertarik untuk lebih meneliti mendalam dengan judul: "Implementasi Kebijakan Kompetensi Guru di SD Muhammadiyah 2 Palu"

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah yang diajukan dalam tulisan ini adalah, ''Bagaimana Implementasi Kebijakan Kompetensi Guru di SD Muhammadiyah Palu. "Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan tulisan ini adalah: ''Untuk menjelaskan bagaimana Implementasi Kebijakan Kompetensi guru di SD. Muhammadiyah 2 Palu."

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Moleong (2010:6) mensintesis definisi penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya; perilaku, persepsi, motifasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan suatu fenomena, karakteristik, situasi atau kejadian pada suatu daerah tertentu secara sistematis, factual dan akurat sebagaimana adanya.

Lokasi penelitian ini bertempat di SD. Muhammadiyah 2 Palu. Peneliti lebih memilih lokasi ini karena beberapa kenyataan tidak sesuai dengan harapan, diantaranya nilai siswa-siswi SD Muhammadiyah 2 Palu hasil ujian nasiolal setiap tahunnya belum memuaskan, dan melihat pula bahwa implementasi kebijakan kompetensi guru di sekolah tersebut belum berjalan maksimal.

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, dimulai bulan Nofember 2015 s/d Januari 2016.

Sumber data dalam penelitian ini berupa natural setting/ situasi alamiah, wajar tanpa rekayasa. Peneliti mencari informasi dari orang-orang dan dokumen yang tepat

yang berada dalam lingkup situasi alamiah tersebut.

Untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, maka data yang diperlukan diperoleh dari 2 (dua) sumber yaitu; (a) data primer berasal dari hasil wawancara dengan informan seperti Kepala UPTD. Kec. Palu Timur, Kepala SD. Muhammadiyah 2 Palu, dan beberapa dewan Guru, dan hasil obserfasi, (b) data sekunder berasal dari SD. Muhammadiyah 2 Palu, terkait tentang dukumen, peraturan perundang-undangan dan referensi-referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengambilan dan pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1) Observasi
   Teknik observasi dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yakni Implementasi Kebijakan Kompetensi Guru di SD. Muhammadiyah 2 Palu.
2) Wawancara
   Teknik pengumpulan data dengan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari informan dan informan kunci mengenai variabel, sub variabel dan indikator yang diteliti dengan cara tanya jawab langsung secara mendalam sampai pada tingkat jenuh. ,
3) Dokumentasi
   Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang bersumber pada catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang ada pada lokasi penelitian.

Pada penelitian ini, Instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri dan dibantu oleh instrument elektronik berupa kamera dan alat perekam serta instrumen lain yang mendukung, dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara yang disusun berdasarkan pada fokus penelitian yang mengarah pada 4 (empat) aspek model implementasi kebijakan Edwards III yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246-253), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data dilakukan melalui 3 tahapan yaitu:

1. Reduksi data (data reduction)
   Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicacat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melaluli reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, mengfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kegitan yang dilakukan pada reduksi data ini pada dasarnya merupakan kegiatan penyusunan satuan atau editing data, dan kategorisasi atau pengelompokan data.
2. Penyajian data (data display)
   Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan atau mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat negative. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification).Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan adalah investasi jangka panjang manusia. Pendidikan merupakan salah satu komponen terpenting bagi kemajuan hidup manusia di seluruh dunia. Begitu juga Indonesia, pendidikan di jadikan sebagia tonggak pembangunan bangsa dan negara. Salah satu komponen yang terdapat dalam pendidikan adalah guru. Guru dalam komponen pendidikan memiliki peran yang besar dan strategis. Karena gurulah yang dijadikan sebagai ujung tonggak dalam pendidikan.

Guru mempunyai tugas yang berat dan mulia dalam mengatarkan anak-anak bangsa ke puncak cita-cita. Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik maka seorang guru selayaknya memiliki kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut peraturan menteri pendidikan nasional nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru meliputi empat kompentensi utama yakni kompetensi pedagogig, kompetensi kepribadIan, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dengan adanya kompetensi tersebut diharapkan seorang guru menjadi tenaga pendidik yang professional dan menghasilkan mutu pendidikan berkualitas.

Implementasi kebijakan kompetensi guru di sekolah sangat penting karena guru merupakan ujung tombak terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Orang yang paling bertanggun jawab untuk melaksanakan kebijakan meningkatkan kompetensi guru adalah kepala sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh terhadap kemampuan guru dan berhak memberikan perlindungan kepada mereka.

Untuk melakukan kajian ilmiah tentang implementasi kebijakan kompetensi guru di SD.Muhammadiyah 2 Palu, maka diperlukan sebuah pendekatan teori. Untuk itu peneliti menggunakan pendekatan teori George Edward III yang melihat implemetasi sebuah kebijakan dapat dilihat dari empat variable yakni komunikasi, sumber daya, diposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan kompetensi guru mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distoris implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Menurut George C. Edwar III, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan yang baik terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Berdasarkan penjelasan teori tersebut maka faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam implementasi kebijakan maka dapat dijabarkan menjadi 3 unsur yakni; adanya transmisi atau penyampaian, adanya kejelasan petunjuk dalam implementasi kebijakan dan, konsistensi dalam menjalankan sebuah kebijakan maka dengan terpenuhinya ketiga faktor

pendudukung komunikasi maka akan tercapai sebuah implentasi kebijakan yang baik dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan karena saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.

Aspek komunikasi menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan kompetensi guru di kota madya Palu, sejauh mana kebijakan tersebut sudah disosialisasikan atau diterapkan di sekolah-sekolah, dari tingkat dasar sampai tingkat menengah. Kompetensi guru harus dipahami secara detail oleh petugas pejabat yang bewewenang dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Palu sebagai implementor (pelaksana) akan tetapi lebih penting pada kepala sekolah bersama dewan guru sebagai kolompok sasaran *(target group)*

2. Sumber Daya

Dilihat dari kompetensi petugas pelaksana (implementor), dalam hal ini dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, kebijakan kompetensi guru diperlukan adanya ketersedian Sumber daya yang handal, baik dari sisi sumber daya manusia, financial dan sarana prasarana pendukung, dalam menyelenggarakan suatu bentuk pelayanan yang baik, faktor ini sangat menentukan suatu keberhasilan suatu kebjakan dengan penggunaan sumber-sumber pendukung lainnya. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Menurut Edwar III dalam agustino (2006:158-159), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakn yang baik. Indikator-indokator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

a. staf.

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi tetapi tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

b. Informasi.

Dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

c. Wewenang.

Pada umumnya kewenagan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewewenangan merupakan ototritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenangan tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegimitasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakn publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentinganya sendiri atau kelompoknya.

d. fasilitas.

Fasilitasi fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung

(sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan te rsebut tidak akan berhasil.

1) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia sangat penting untuk mencapai tujuan dari pelaksana kebijakan kompetensi tersebut agar dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Kemampuan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palu dan UPTD.Pendidikan Kecamatan Palu Timur,dalam hal ini pengawas pendidikan TK/SD diakui masih belum memadai, meski upaya tersebut terus dilakukan oleh kepala sekolah dalam kegiatan Kolompok Kerja Guru (KKG).

2. disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah disposisi atau sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijkan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implemtor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana ‘mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan intesif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

Menurut edwar III dalam agustino (2006), disposisi adalahah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implmentor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implmentor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijkan,tetapi bila sebaliknya, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak baik.

Demikian hanya dalam implementasi kebijakan kompetensi guru di SD Muhammadiyah 2 Palu, komitmen atau dukungan serius dari pejabat pelaksana dalam hal ini Dinas pendidikan kota Palu, UPTD.Kecamatan Palu Timur, sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan agar bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pada prinsipnya, kedua pihak pelaksana ini sangat mendukung penerapan kompetensi guru khususnya di tingkat sekolah dasar (kolompok sasaran) Di lain pihak, guru-guru juga mendukung kebijakan tersebut terlebih bertujuan untuk meningkatkan kualitas atau kapasitas tenaga pengajar itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara diatas terbukti bahwa pelaksanaan kebijakan kompetensi guru di SD.Muhammadiyah 2 Palu telah berjalan sesuai aturan birokrasi yang ada. Pelaksana kebijakan dalam hal ini Dinas Pendidikan telah melaksanakan kebijakan tersebut dengana tetap melalui koordinasi pihak UPTD. Pendidikan Kecamatan Palu Timur.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas yang kemudian diolah dengan

menggunakan model teori Edwar III yang terdiri dari empat aspek yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, maka dapat digambarkan dalam bentuk matriks sebagai berikut:

Implementasi Kebijakan Guru di SD.Muhammaddiya 2 Palu

Model Implementasi Kebijakan	Dampaknya
-Komunikasi	Belum baik/ ditingkatkan
-Sumber daya	Belum baik/ ditingkatkan
-Disposisi	Sudah baik/ pertahankan
-Struktur Birokrasi	Sudah baik/ pertahankan

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dapat dijelaskan, hasil penelitian ini menunjukan bahwa aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dalam Implementasi Kebijakan Kompetensi Guru ialah aspek *komunikasi dan sumber daya,* sedangkan aspek yang sudah berjalan dengan baik adalah aspek *disposisi dan struktur birokrasi*.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Implementasi Kebijakan Kompetensi Guru di SD Muhammadiyah 2 Palu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa, adanya *komunikasi* yaitu transmisi atau penyampaian , adanya kejelasan petunjuk dalam implementasi kebijakan dan, konsistensi dalam menjalankan sebuah kebijakan belum berjalan dengan baik, begitu pula *sumber daya* yakni sumber daya manusia dan sumber daya financial perlu ditingkatkan. Sedangkan *disposisi* yaitu sikap kemauan, komitmen, kejujuran, kewenangan dan *struktur birokrasi* menyangkut Standard Oprasional Procedure (SOP) dan kewenangan sudah baik.
2. Aspek *komunikasi dan sumber daya*, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial belum baik, disebabkan masih menghadapi kendala dan hambatan yaitu masih kurang sosialisasi melalui transmisi secara jelas dan konsisten, sedangkan sumber daya manusia yaitu masih perlu ditingkatkan pengetahuan tentang Implementasi kebijakan kompetensi guru. Begitu pula sumber daya financial belum memadai.

Rekomondasi

Sesuai masalah yang dihadapi oleh SD.Muhammadiyah 2 Palu,tentang Implementasi Kebijakan Kompetensi Guru, maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar pemerintah yang berwewenang, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Palu senantiasa melakukan sosialisasi melalui transmisi yang jelas dan konsisten tentang isi Implementasi Kebijakan Kompetensi Guru.
2. Dinas Pendidikan Kota Palu selama ini telah memberikan wewenang penuh kepada pihak penyelenggara pendidikan ditingkat kecamatan,dalam hal ini UPTD. Kecamatan Palu Timur, perlu membekali pengawas tentang pengetahuan Implementasi Kebijakan Kompetensi Guru secara maksimal, dan mengagendakan setiap melakukan superfisi di sekolah-sekolah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan artikel ini, banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan sehingga penyusunan artikel ini dapat diselesaikan. Pantas kiranya penulis dengan hati yang tulus mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Tim Pembimbing

Dr.Hj.Mustainah M.Si. dan Anggota Tim Pembibing Dr. Dirdja N Jahya M.Si.

DAFTAR RUJUKAN

Abdul Wahab, Solichin. 2012.Analisis Kebijakan,dariFormulasi epenyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Agustino, Leo. 2012, Dasar Dasar Kebijakan Publik. Bandung Alfabeta, Cetakan ke tiga.

Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana.*

Alfabeta, Cetakan ke- 3.

Aneta, Asna. 2010. *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan*

El Ansori, Yuli Tirtariandi, dkk. 2012. *Kebijakan Publik Yang Partisipatif dan Komunikatif. Jurnal Kebijakan Publik,* Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012, hlm.59-141.Melalui: http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/890/883 (13/07/13)

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38281/2/Reference.pdf

Jurnal Administari Publik. Volume 1 No. 1 Thn. 2010 Hal: 1–11. Melalui:

Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010. Hal: 54-65 Melalui: www.slideshare.netAtawbp-Implementasi-kebijakan (13/07/13)

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. LEMLIT UNPAD.

Makmun, Abin Syamsuddin, (2000). *Konsep Dasar Penilaian Kompetensi Profesional 'Tenaga Kependidikan.* Bandung: UPI

Moleong, L.J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Moleong, L.J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy. Analisis, Strategi, Advokasi Teori dan Praktek.* Surabaya: Putra Media Nusantara.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar

Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasi di Indonesia.* Yogyakarta: Gava Media, Cetakan 1.

Riyanto, Ayi. 2008. Working Paper: *Studi Implementasi Kebijakan Publik.* Scribd.com. Melalui: www.scribd.com/doc/28193139/Implementasi-Kebijakan-Publik-Working-Paper (06/02/13)

Satori, D.dan Komariah. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:

Saud, Udin Syaefudin. (2009). Pengembangan Profesi guru. Bandung: Alfabeta

Spencer, Lyle M, JR & Signe M Spencer (1993) Competence et work: Modelsfor superior performance. John Wiley & Sons. Inc

Sugiana, Puji Meilita. 2002. *Implemntasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan.* Tesis tidak Diterbitkan. Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Program Studi Administrasi Kebijakan Publik Jakarta. Melalui: lib.ui.ac.id/file=digital/20317298...Implementasi%20kebijakan.pdf (21/17/13).

Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. AIPI Bandung-Puslit KP2W

Umar A. Amir. 2012. *Analisis Implementasi Kebijakan Kompetensi Guru dalam Pengajaran di SMP Negeri I Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong*. Tesis tidak diterbitkan. Palu. ProgramStudi Magister Administrasi Publik. Pascasarjana Universitas Tadulako Palu.

Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus.* Yogyakarta: CAPS, Cetakan Pertama.